

ABSTRAK

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau termasuk kendala dominan yang dihadapi saat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah guna manifestasi bersama dalam meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dan menganalisis kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pembauran kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Hasil dari analisa permasalahan dari Teori Grindle berdasarkan indikator yang meliputi Dimensi Isi Kebijakan (*content of policy*) bahwa Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan melibatkan sejumlah pihak/kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, Forum-forum dan masyarakat yang saling berkaitan dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam menciptakan kondisi yang kondusif perlu adanya dukungan regulasi di daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan anggaran yang belum maksimal terkait Forum Pembauran Kebangsaan. Dimensi Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*) bahwa Pemerintah memiliki kepentingan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dilingkungan masyarakat dengan melibatkan Forum Pembauran Kebangsaan sebagai manifestasi perwakilan suku dan semua stakeholder guna memudahkan pelaksanaan setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah daerah agar berjalan optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kesimpulan yang didapat dari Implementasi pelaksanaan tugas dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 salah satunya Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan berjalan belum optimal dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembauran kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau belum adanya peraturan daerah, peraturan kepala daerah, anggaran yang belum optimal, belum tersedianya kantor dan kendaraan operasional untuk membantu pelaksanaan tugas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

ABSTRACT

Implementation of the policy for implementing national assimilation in the regions which is the responsibility of the National Unity and Political Agency of the Riau Islands Province is one of the dominant obstacles faced when implementing Minister of Home Affairs Regulation Number 34 of 2006 concerning Guidelines for Implementing National Assimilation in the regions for joint manifestation in increasing the sense of unity and oneness.

The aim of this research is to identify the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation Number 34 of 2006 concerning Guidelines for Implementing National Mixture in the regions at the National Unity and Political Agency of the Riau Islands Province and to analyze the obstacles faced in the implementation of the national assimilation policy at the Provincial National Unity and Political Agency Riau islands

The results of the problem analysis of the Grindle Theory based on indicators which include the Policy Content Dimension (content of policy) are that the implementation of policies in the implementation of the National Assimilation Forum involves a number of parties/interests consisting of the Government, Forums and society which are interrelated in maintaining unity and unity. In creating conducive conditions, it is necessary to have regulatory support in the regions in the form of Regional Regulations, Regional Head Regulations and budgets which have not been maximized regarding the National Assimilation Forum. Environmental Dimensions of Implementation (Context of Implementation) that the Government has an interest in maintaining unity and unity in the community environment by involving the National Intermingling Forum as a manifestation of tribal representatives and all stakeholders in order to facilitate the implementation of every policy made by the regional government so that it runs optimally in order to realize prosperity for the community .

The conclusions obtained from the implementation of the tasks of the National Assimilation Forum of the Riau Islands Province are based on Minister of Home Affairs Regulation Number 34 of 2006, one of which is that capturing community aspirations in the field of national assimilation has not been optimal and the obstacles faced in implementing the national assimilation policy at the National Unity and Political Agency The Riau Islands Province does not have regional regulations, regional head regulations, a budget that is not optimal, and there are no offices and operational vehicles to help carry out tasks..

Keywords : *Policy Implementation. Implementation of National Assimilation*